

IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN SIKAP PROFESIONAL PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH

Santosa, HS *)

ABSTRACT

A positive policy must have been hoped to be able to influence to the change of the object quality of the policy itself as the order of futuristic system and has a standard substance towards the aim of the components.

To serve and fullfill the society needs, the educators and the educational officers have to improve the quality of their main duties and functions system as well as the personal and systematic professional attitudes.

The needs can be obtained effectively by applying futuristic policies as the governmental products, only for developing of the educators and ecudational officers, especially to the aim of the "Permendiknas nomor 12 tahun 2007" about school supervisors.

Keyword:

Standar Pengawas Sekolah,
pengembangan sikap profesionalis-
me

Salah satu agenda pemerin-tah dalam menggapai perubahan adalah upaya meningkatkan mutu pendidikan pada masing-masing lembaga pendidikan yang ada dan mengembangkannya secara kualitatif disamping kuantitasnya. Hal ini akan terus berlangsung karena didukung oleh sistem pemerintahan yang menuntut adanya kompetisi yang semakin ketat antar lembaga yang berpacu pula dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sedangkan keberhasilan dalam

*) Mahasiswa program Doktor
Manajemen Pendidikan Uni-
versitas Negeri Malang

persaingan ter-sebut sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan (*Costumer requirements*).

Sebuah lembaga dalam hal ini (Dinas pendidikan/sekolah) akan dapat berkiprah dalam mening-katkan dan mempertahankan kuali-tasnya hanya dengan cara mem-bangun sistem peningkatan mutu dan menetapkan standar kuali-tasnya. Salah satu formula/model sistem peningkatan kualitas adalah dengan menerapkan kebijakan /regulasi pemerintah yang salah satunya tentang standar pengawas sekolah. Adapun pengembangan profesional diharapkan menjadi implikasi atas implementasi ke-bijakan yang futuristik.

Upaya implementsi kebij-kan pemerintah tersebut seperti halnya Undang-undang guru dan Dosen akan terus dilaksanakan dan dikembangkan seiring dengan perkem-bangan Teknologi Infor-masi dan Komunikasi yang di-dukung pula dengan terobosan-terobosan pemerintah untuk bidang persekolahan. Salah satu terobosan tersebut misalnya program pener-bitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada setiap pendidik dan Tenaga kependidikan, maupun program sertifikasi. Sungguhpun demikian pada tataran pemerintah daerah masih saja menuai persoalan yang tiada henti yang mana disebabkan bahwa dalam menyelenggarakan program tersebut dapat dipandang kurang mempertimbangkan rasional tertentu.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut seyogyanya model pemikiran deduktif dilakukan, karena secara praktis dalam bidang persekolahan terdapat istilah "three in one" yang artinya bahwa antara pengawas, kepala sekolah dan guru merupakan satu paket yang bertanggung jawab secara akademik maupun administratif terhadap kualitas pendidikan di bidang

persekolahan. Sehingga pemerin-tahpun seyogyanya menggunakan pendekatan yang sama atau mungkin perlu dalam hal tertentu menerapkan *uniformitas* terhadap setiap batasan/konsep operasional yang akan dikembangkan mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Fokus bahasan pada karya ini didasarkan atas pertimbangan bahwa implementasi kebijakan mengenai Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah tersebut erat sekali hubungannya dengan prospek pengembangan sikap profesional bagi pengawas sekolah. Disamping itu, secara faktual Edward F.DeRoche¹, dalam bukunya *"How School Administrators Solve Problems"* mengemukakan bahwa ada tiga macam fakta administratif dalam kehidupan sekolah yang secara yuridis formal merupakan tanggung jawab Pengawas sekolah dalam menyelesaikan fakta tersebut, *pertama*, bahwa kepala sekolah memiliki masalah dalam kehidupan sekolahnya. *kedua*, kepala sekolah mengetahui bahwa masalah tersebut memberi peluang bagi pertum-buhan kepemimpinannya. *ketiga*, bahwa kualitas pendidikan me-rupakan akibat dari keefektif an kepemimpinan melalui perannya sebagai Kepala sekolah.

Mencermati ketiga fakta tersebut, maka pengawas sekolah/ madrasah sangat perlu dipersyarat-kan memiliki kualifikasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan pendidikan yang secara spesifik mengarah pada peningkatan kualitas pembelajaran

¹ Edward F.DeRoche.1985. *How School Admistrators Solve Problems*. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey

Secara konseptual, pengawasan sebenarnya merupakan terjemahan dari kata *controlling*. Literatur lain menyatakan terjemahan dari *inspection*. Hemat penulis, terminologi apapun yang dikemukakan, yang jelas pengawasan adalah salah satu dari fungsi manajemen.. Kimbrough dan Nurney mengartikan pengawasan sebagai proses memonitor kegiatan-kegiatan. Tujuannya adalah untuk menentukan harapan-harapan secara nyata dicapai dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Yang dimaksud dengan harapan-harapan disini adalah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai dan program program yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam proses pendidikan, pengajaran dan bimbingan terdapat tiga komponen yang terlibat meskipun berbeda tugas dan perannya, tetapi tidak dapat dipisahkan antara komponen yang satu dengan lainnya. Komponen dalam proses pendidikan, pengajaran dan bimbingan yang dimaksud adalah Guru, Kepala sekolah dan Pengawas sekolah. Antara Guru, Kepala sekolah dan Pengawas sekolah secara fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya merupakan suatu system, artinya merupakan "sekelompok komponen yang bekerja bersama-sama secara interdependen untuk mencapai sesuatu"², disamping lingkungan juga dipersyaratkan sebagai faktor pendukungnya.

Guru, di sekolah berperan sebagai pendidik, pembimbing, pelatih dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah berperan sebagai manajer dan supervisor bagi guru dalam rangka memperbaiki

proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Sebagai manajer Kepala sekolah dalam manajemennya mengejar kesuksesan perkembangan anak manusia melalui pelayanan-pelayanan pendidikan yang memadai³

Sedangkan Pengawas sekolah pada umumnya berperan sebagai pembimbing, yang secara fungsional memberi bantuan bagi Kepala sekolah dan atau Guru dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran di kelas.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 118 tahun 1996 bahwa yang dimaksud seorang Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah. Sehingga pengawas sekolah yang dimaksud memiliki bidang pengawasan sebagai berikut:

1. Bidang pengawasan TK/RA/BA,SD/MI/Madrasah Diniyah/SDLB
2. Bidang pengawasan Rum-pun Mata Pelajaran/Mata Pelajaran
3. Bidang pengawasan Pendidikan Luar Biasa
4. Bidang pengawasan Bimbingan dan Konseling

Keputusan tersebut sebenarnya merupakan awal dari formula kebijakan mengenai tugas pokok dan fungsi kepengawasan di bidang persekolahan yang lebih mengarah pada aspek-aspek kepengawasan itu

² Bacal, Robert. 2001. Performance Management. Terj.Surya Darma dan Yanuar Irawan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 31

³ Pidarta, Made. 1995. *SD dan Teknik-teknik Mengajar Pada Beberapa Sekolah Di Australia*. Laboratorium Administrasi Pendidikan FIP IKIP Surabaya. Hal 1

sendiri. Walaupun demikian secara spesifik masih belum menjangkau kebutuhan lembaga pendidikan pra sekolah. Secara praktis pun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan Kejuruan. Untuk itu Kepmenpan 118 tahun 1996 tersebut diperbaharui dengan SK Menpan Nomor 091/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan fungsional Pengawas sekolah dan Angka kreditnya dinyatakan bahwa Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah (pasal 1 ayat 1). Selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) SK Menpan nomor 118 tahun 1996 dinyatakan Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk atau yang ditetapkan. Pada pasal 5 ayat (1) dinyatakan: tanggung jawab pengawas sekolah yakni : (a) melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya dan; (b) meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Tanggung jawab pertama merupakan implikasi dari pentingnya pengawasan manajerial sedangkan tanggung jawab yang kedua merupakan implikasi dari pentingnya pengawasan akademik.

Ditinjau dari substansi, bahkan dalam hubungannya dengan kompetensi yang diperlukan, Keputusan Menpan nomor 118 tahun 1996, maupun Kepmenpan nomor 091/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan fungsional Pengawas sekolah dan Angka kreditnya tersebut, disinyalir masih lebih bersifat teoritik

dan konseptual, sehingga pemerintah dewasa ini melakukan upaya penyempurnaan terhadap keputusan tersebut seiring dengan tuntutan, situasi dan kondisi otonomi daerah.

Salah satu upaya penyempurnaan tersebut antara lain ditandai dengan penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PerMendiknas) Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Dalam keputusan tersebut Pengawas sekolah dipersyaratkan memiliki sejumlah kompetensi secara riil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sejumlah kompetensi yang dimaksud adalah Kompetensi : 1) Kepribadian; 2) Supervisi Manajerial; 3) Supervisi Akademik; 4) Evaluasi Pendidikan; 5) Penelitian dan pengembangan; dan 6) Kompetensi Sosial.

Dilihat dari segi perkembangan kebijakan tentang kepengawasan, baik yang bersumber dari Menpan nomer 118 tahun 1996 maupun Permendiknas nomor 12 tahun 2007, tentunya pelaksanaan kepengawasan baik di sekolah maupun madrasah telah mengalami perkembangan yang mengacu pada kebijakan tersebut. Selanjutnya bagaimana kondisi objektif pelaksanaan kepengawasan yang sedang berlangsung

Karakteristik Pengawas sekolah :

Bahwa berdasarkan permen-diknas nomor 12 tahun 2007, pengawas sekolah dipersyaratkan memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang per-sekolahan.

A. Kualifikasi Pengawas SMK / MAK

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007, tentang Standar Pengawas sekolah dan Madrasah, pengawas Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah

Kejuruan (SMK/MAK) dipersyaratkan memiliki kualifikasi sebagai berikut :

1. Memiliki pendidikan minimum magister (S-2) kependidikan dengan ber-basis sarjana (S-1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi.
2. Guru SMK/MAK berser-tifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau Kepala sekolah SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum empat tahun, untuk menjadi pengawas SMK/MAK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya.
3. Memiliki pangkat minimal Penata, golongan/ruang III/c.
4. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.
5. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau Pendidikan dan Pelatihan fungsional Pengawas pada Lembaga yang ditetapkan pemerintah, dan
6. Lulus Seleksi satuan Pendidikan.

B. Kompetensi Pengawas sekolah

Sejumlah kompetensi yang dipersyaratkan terhadap pengawas SMK/MAK, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2007 adalah sebagai berikut :
(Tabel 1.1- 1.3)

Demensi	Kompetensi :
1. Kepribadian	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Memiliki tanggungjawab sebagai pengawas satuan pendidikan 1.2. Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya 1.3. Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya 1.4. Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan
2. Supervisi Manajerial	<ol style="list-style-type: none"> 2.1. Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Menengah Kejuruan. 2.2. Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi misi tujuan dan program pendidikan di sekolah Menengah Kejuruan 2.3. Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah 2.4. Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindak lanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah Menengah Kejuruan

Tabel 1.1

Demensi	Kompetensi :
	<p>2.5. Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah Menengah Kejuruan.</p> <p>2.6. Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah Menengah Kejuruan</p> <p>2.7. Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah menengah Kejuruan</p> <p>2.8. Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah Menengah Kejuruan</p>
3. Supervisi Akademik	<p>3.1. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.</p> <p>3.2. Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran di sekolah menengah yang sejenis.</p> <p>3.3. Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap Mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis, berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP</p> <p>3.4. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/ bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mata-mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan disekolah menengah yang sejenis.</p> <p>3.5. Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.</p> <p>3.6. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam maupun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.</p> <p>3.7. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis</p> <p>3.8. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis</p>

Tabel 1.2

Demensi	Kompetensi :
4. Evaluasi pendidikan	<p>4.1. Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.</p> <p>4.2. Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.</p> <p>4.3. Menilai kinerja kepala sekolah, guru dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/ bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.</p> <p>4.4. Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap matapelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis</p> <p>4.5. Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/ bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.</p> <p>4.6. Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah di sekolah menengah yang sejenis.</p>
5. Penelitian dan Pengembangan	<p>5.1. Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan</p> <p>5.2. Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawas maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas</p> <p>5.3. Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif</p> <p>5.4. Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya.</p> <p>5.5. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun kuantitatif</p> <p>5.6. Menulis karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan atau bidang Kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan</p> <p>5.7. Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah</p> <p>5.8. Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindak kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah</p>
6. Sosial	<p>6.1. Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya</p> <p>6.2. Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan</p>

Tabel 1.3

C. Tanggung jawab dan wewenang Pengawas SMK/MAK berdasarkan Keputusan Menpan nomor 118 tahun 1996.

- a. Pengawas sekolah memiliki tanggung jawab :
 1. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya.
 2. meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- b. Wewenang Pengawas sekolah adalah :
 1. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.
 2. menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lain yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi.
 3. menentukan dan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

D. Karakteristik Kebijakan pemerintah tentang Pengawas sekolah.

Tabel 2 tersebut tidak menekankan Perbedaan antara Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 12/2007 dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 118/1996 semata, namun lebih mengemukakan bahwa kebijakan tersebut yang sebenarnya merupakan kebijakan positif. Betapa tidak, bahwa dalam sejarah kepengawasan di bidang persekolahan Keputusan Menpan nomor 118 tahun 1996 sebenarnya merupakan awal dari "*legal aspect*" bagi Pengawas sekolah. Meskipun lahirnya diikuti dengan Keputusan Bersama Mendikbud – Kepala BAKN bahkan dilengkapi pula dengan Petunjuk teknis, namun masih belum sesuai dengan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan di bidang persekolahan.

Menurut Keputusan Menpan nomor 118 tahun 1996 dinyatakan bahwa ada empat bidang pengawasan yang dimiliki Pengawas sekolah, yakni bidang pengawasan : a) TK/RA/BA, SD/MI/Madrasah Diniah/SDLB; b) Rumpun Mata Pelajaran/Mata Pelajaran; c) Pendidikan Luar Biasa; d) Bidang pengawasan Bimbingan dan Konseling

**Perbandingan antara Permendiknas No 12/2007 dengan Kepmenpan
118/1996**

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 12/2007	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 118/1996
<p>Memutuskan :</p> <p>Standar Pengawas sekolah dan Madrasah, yang berisi :</p> <p>A. Kualifikasi Pengawas</p> <p>B. Kompetensi Pengawas, dalam enam dimensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepribadian 2. Supervisi Manajerial 3. Supervisi Akademik 4. Evaluasi Pendidikan 5. Penelitian dan Pengembangan 6. Sosial 	<p>Memutuskan :</p> <p>Jabatan Fungsional Pengawas sekolah dan angka kreditnya, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> C. Ketentuan umum D. Kedudukan dan tugas pokok E. Tanggung jawab dan wewenang F. Bidang dan unsur kegiatan G. Jenjang jabatan dan Pangkat H. Rincian tugas dan unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit. I. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit J. Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam dan dari jabatan. K. Penyesuaian dalam jabatan dan angka Kredit L. Syarat pengangkatan M. Pembebasan sementara dan Pemberhentian dari jabatan N. Ketentuan Lain-lain O. Penutup. <p>Keputusan ini telah dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Bersama, Mendikbud (no. 0322/O/1996) dan Kepala BAKN (No: 38 th 1996) tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya) 2. Keputusan Mendikbud RI No 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Tabel 3

Mencermati keempat bidang tersebut tampak bahwa bidang-bidang tersebut secara praktis dalam tataran pelaksanaan belum dapat memenuhi kebutuhan pada masing-masing lembaga. Karena dari segi sumberdaya pengawas sekolah sendiri sebaran latar belakang pendidikan yang sesuai

belum memenuhi kebutuhan secara riil. Sebagai contoh, seorang pengawas sekolah yang berlatar belakang non LPTK bertugas pada sekolah kejuruan. Pelaksanaan Otonomi daerah, secara praktis ikut berdampak dan mewarnai kecenderungan tersebut, dimana dalam proses pelaksanaannya

senantiasa mengandung dan mengundang 'deviasi' bagi aktor-aktor kebijakan di daerah karena berbagai macam alasan, baik perampangan/efisiensi struktur organisasi maupun penataan kembali dalam konteks peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Sehingga ketika terjadi proses perampangan ataupun penataan dalam bentuk kebijakan yang kurang futuristik, maka akan muncul kecenderungan – kecenderungan dan menimbulkan masalah baru yang erat sekali hubungannya dengan rencana pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan di bidang persekolahan. Oleh karena itu perlu penyempurnaan-penyempurnaan yang bermuara dari kompetensi pengawas sekolah itu sendiri, dimana pengembangan sikap hendaknya menjadi prioritas utama.

Pada dimensi Kepribadian, Pengawas sekolah dipersyaratkan memiliki tanggungjawab sebagai pengawas satuan pendidikan; sikap Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya; Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya; Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan.

Dalam hubungannya dengan kompetensi yang dipersyaratkan kepada pengawas sekolah, Oliva, 1984. mengemukakan bahwa langkah kita dalam dunia supervisi akan membawa diri kita ke arah pengembangan staf. Banyak makna luas yang berguna bagi kepala sekolah dan pengawas atas adanya perbedaan pendapat para ahli

supervisi, sebagaimana tergambar dalam beberapa pertanyaan berikut :1) apakah supervisi itu hanya untuk pengembangan staff ? 2) apakah pengembangan staff sama seperti "in-service education"? 3) haruskah kita menyediakan kegiatan seperti "in-service education" bagi pengawas sekolah ?

Apapun istilahnya, tidak berlebihan apabila sejumlah pertanyaan tersebut dikembangkan dan untuk ditemukan jawabannya untuk kepentingan pengembangan staf, khususnya pengembangan sikap bagi pengawas sekolah, dalam rangka menggapai kompetensi yang dipersyaratkan bagi pengawas sekolah secara nyata. Karena apabila ditinjau dari norma sosial, bahwa dimensi kepribadian ini merupakan persyaratan ideal dan mutlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengawas sekolah, sehingga hal tersebut dapat menjadi referensi bagi sasaran kepengawasannya. Tidaklah pula berlebihan, untuk menambah postulat sasaran kepengawasannya maupun pengawas sekolah itu sendiri, pemerintah dalam hal rekrutmen pengawas sekolah seyogyanya mengambil dari tenaga pengawas yang linear dengan bidang tugas kepengawasannya atau paling tidak tenaga pengawas tersebut merupakan output Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) termasuk kalangan guru dan atau kepala sekolah, dan dilengkapi kualifikasi lainnya yang menunjang.

Daftar Pustaka

Depdikbud. 1997/1998a. *Keputusan Menpan Nomor 118 / 1996, tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya.*

- Depdikbud. 1997/1998b. *Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 0322/O/1996, Nomor 38 tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya.*
- Depdikbud. 1997/1998c. *Keputusan Mendikbud RI Nomor 020/U/1998, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya.*
- Depdiknas. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007, tentang Standar pengawas sekolah dan madrasah*
- Edward F.DeRoche.1985. *How School Admistrators Solve Problems.* Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey
- F. Oliva.1984. *Supervision for Today's Schools.* By. Longman Inc.,1560 Broadway, New York
- Surya Dharma. 2008. *Naskah Akademik.* Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Tenaga Kependidikan. Jakarta
- Bacal, Robert. 2001. *Performance Management.* Terj.Surya Darma dan Yanuar Irawan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pidarta, Made. 1995. *SD dan Teknik-teknik Mengajar Pada Beberapa Sekolah Di Australia.* Laboratorium Administrasi Pendidikan FIP IKIP Surabaya.

